

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Biden telah melakukan beberapa upaya untuk merestorasi dan memperluas cakupan DACA selama periode 2020-2024. Pada hakikatnya, isu imigrasi di AS merupakan isu yang dinamis, di mana kebijakan terkait selalu berkembang mengikuti kebutuhan serta tren migrasi yang ada dari waktu ke waktu, dan tantangan yang bervariasi, sehingga membutuhkan langkah-langkah yang berbeda di setiap periode. Dalam konteks ini, di tengah berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis, Biden berkomitmen untuk mereformasi sistem imigrasi AS, termasuk memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi *Dreamers*. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukannya, seperti kodifikasi DACA sebagai peraturan federal dan pengusulan beberapa RUU, tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Terutama karena adanya ketidaksesuaian realita dengan agenda yang Biden buat dalam rangka merestorasi dan memperluas cakupan DACA.

Meskipun Biden mengeluarkan memorandum kepresidenan untuk memperluas cakupan DACA dan mengurangi batasan-batasan yang sebelumnya ditetapkan oleh Trump, hasilnya tetap tidak memadai. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan DACA untuk mendapatkan dukungan bipartisan di Kongres, yang mengakibatkan stagnasi dalam penguatan status DACA secara nasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan ideologis mendasar antarpantai yang menyebabkan kegagalan Kongres untuk menemukan titik temu, sehingga mereka tidak dapat mengesahkan DACA ataupun kebijakan-kebijakan pendukungnya sebagai undang-undang yang sah. Hal tersebut pada akhirnya juga menimbulkan tantangan dari segi yudikatif, di mana DACA rentan terhadap tuntutan-tuntutan hukum. Putusan-putusan pengadilan yang menentang keberadaan DACA mempersulit upaya Biden untuk merestorasi program tersebut, dan larangan dari pengadilan yang mencabut izin USCIS untuk menerima pelamar baru menunjukkan betapa rentannya program ini terhadap keputusan hukum yang dapat mengubah

statusnya secara drastis. Di samping itu, upaya Biden untuk memberikan sebagian hak warga negara, yaitu melalui pemberian akses ACA, kepada *Dreamers*, juga masih mengalami tantangan dari sisi hukum yang terus berlanjut. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi individu-individu yang bergantung pada DACA untuk mendapatkan keamanan untuk terus hidup di AS secara sah dan stabilitas hidup mereka.

Pengaruh kepemimpinan Biden terhadap kebijakan imigrasi terlihat jelas melalui perbedaan pendekatan antara masa kepresidenan Trump dan Biden, dengan Biden lebih fokus pada perlindungan hak imigran ilegal melalui DACA. Namun, upaya Biden untuk merestorasi dan memperluas DACA menghadapi berbagai hambatan, termasuk faktor idiosinkratik dari dirinya sendiri. Kepribadian Biden yang kompromistis dan lebih mengutamakan dialog menghalangi pengambilan keputusan yang tegas dan cepat. Selain itu, usia Biden yang semakin tua berpotensi mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan. Ambisi Biden untuk mencapai kesepakatan bipartisan di Kongres juga memperlambat proses, sementara pengalaman politiknya membuatnya terlalu berhati-hati dalam mengambil langkah agresif. Empati yang dimilikinya justru menyebabkan Biden menghindari konflik dan berusaha memenuhi berbagai pihak, sehingga kesepakatan final mengenai DACA sulit tercapai.

Secara keseluruhan, upaya Biden dalam merestorasi dan memperluas DACA mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan imigrasi AS, di mana DACA membutuhkan rencana yang komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak dan berbagai lapisan pemerintahan, dalam rangka mendapat dukungan yang lebih luas, sehingga dapat merealisasikan implementasi yang efektif. Meskipun terdapat tekad yang kuat dan beberapa langkah positif yang diambil oleh Biden, hambatan-hambatan yang berasal dari Kongres, tuntutan hukum, serta faktor-faktor idiosinkratik dari Biden sendiri menunjukkan bahwa mencapai perubahan yang signifikan dalam kebijakan imigrasi memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi.

VI.2. Saran

VI.2.1. Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat penulis berikan untuk mendukung upaya restorasi dan perluasan DACA yang lebih baik, serta untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya di masa mendatang. Saran-saran tersebut yaitu:

- a. Perlu adanya optimalisasi upaya lobi dan menjalin komunikasi yang lebih intens dan bijak dengan anggota Kongres untuk mencapai kesepakatan yang lebih jelas. Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan kolaboratif untuk mengurangi polarisasi politik yang menghambat pengesahan kebijakan, baik DACA maupun kebijakan-kebijakan menyangkut imigran ilegal lainnya.
- b. Untuk mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah perlu melakukan penyuluhan serta pernyataan publik secara berulang untuk menjelaskan manfaat DACA, terutama dalam kontribusi ekonomi dan sosial *Dreamers* bagi AS. Hal tersebut dapat membantu mengurangi ketidapahaman publik dan mengatasi persepsi negatif terhadap imigran ilegal, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif terkait keberadaan DACA.
- c. Pemerintah perlu memperkuat strategi hukum untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan yang menentang keberadaan DACA. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan banding terhadap putusan-putusan yang merugikan DACA secara agresif atau bahkan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku, tanpa mengurangi hak dasar *Dreamers*, sehingga DACA dapat lebih mudah diterima oleh berbagai pihak dan diimplementasikan secara sah.

VI.2.2. Saran Teoritis

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis mengenai kebijakan-kebijakan imigrasi lainnya, khususnya yang serupa dengan DACA, di negara-negara lain, misalnya Kanada atau negara-negara Uni Eropa.

Dengan meneliti tentang hal tersebut, penulis berharap akan akan muncul wawasan baru mengenai pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi isu imigrasi ilegal serta hak-hak imigran. Hal tersebut memiliki potensi untuk memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan imigrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.